

**PLURALITAS MAKNA BUDAYA DALAM KAJIAN
ANTROPOLOGI POSTMODERNISME**

Mardiyanti ¹, Susi Susanti ², A.Tenri Rama Devi ³, Kay Ilonka ⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar

¹: mardiyanti210@gmail.com , ²Susisusanti.032005@gmail.com ,
³atenri147@gmail.com , ⁴ kayilonkaa@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the plurality of cultural meaning within the perspective of postmodern anthropology, exploring how postmodern thought has fundamentally transformed the understanding of culture as a non-singular, unstable system of meaning that is always in the process of negotiation. Through a critical literature review approach, this article traces the theoretical contributions of key thinkers such as Clifford Geertz, James Clifford, George Marcus, Michael Fischer, and Homi K. Bhabha in understanding culture as an arena of contested meanings. The findings demonstrate that postmodern approaches in anthropology not only critique the universalism and objectivism of classical ethnography, but also open new epistemological spaces for understanding hybrid, subaltern, and polyphonic identities in contemporary cultural realities. The article concludes that the plurality of cultural meaning is an inherent condition of human existence that must be acknowledged rather than homogenized.

Keywords: : cultural plurality, postmodern anthropology, reflexive ethnography, cultural meaning, hybrid identity

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pluralitas makna budaya dalam perspektif antropologi postmodernisme, dengan menelaah bagaimana arus pemikiran postmodern telah merombak cara pandang terhadap kebudayaan sebagai sistem makna yang tidak tunggal, tidak stabil, dan selalu berada dalam proses negosiasi. Melalui pendekatan kajian pustaka kritis, artikel ini menelusuri kontribusi teoretis para pemikir utama seperti Clifford Geertz, James Clifford, George Marcus, Michael Fischer, dan Homi K. Bhabha dalam memahami kebudayaan sebagai arena kontestasi makna. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan postmodern dalam antropologi tidak hanya mengkritik universalisme dan objektivisme etnografis klasik, tetapi juga membuka ruang epistemologis baru bagi pemahaman identitas hibrid, subaltern, dan polifonik dalam realitas kultural kontemporer. Artikel ini menyimpulkan bahwa pluralitas makna budaya merupakan kondisi inheren dari keberadaan manusia yang harus diakui, bukan diseragamkan.

Kata Kunci: : *pluralitas budaya, antropologi postmodernisme, etnografi reflektif, makna budaya, identitas hibrid*

A. Pendahuluan

Kebudayaan, sebagai objek kajian utama antropologi, telah lama dipahami sebagai sistem nilai, norma, simbol, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam tradisi antropologi klasik yang dipengaruhi oleh empirisme dan positivisme, kebudayaan sering dipotret sebagai entitas yang koheren, statis, dan dapat diobservasi secara objektif oleh peneliti dari luar (Tylor, 1871; Malinowski, 1922). Namun, gelombang pemikiran postmodern yang menguat sejak pertengahan abad ke-20 telah mempersoalkan asumsi-asumsi dasar tersebut secara fundamental.

Postmodernisme, sebagai suatu arus intelektual, menolak narasi tunggal dan universal tentang realitas sosial-budaya. Para pemikir seperti Jean-Francois Lyotard (1984), Jacques Derrida (1976), dan Michel Foucault (1972) menunjukkan bahwa setiap pengetahuan bersifat terkonstruksi, parsial, dan bermuatan relasi kuasa. Dalam konteks antropologi, kritik ini membuka perdebatan mendalam tentang bagaimana budaya seharusnya dipahami, direpresentasikan, dan

ditulis terutama dalam praktik etnografi.

Pluralitas makna budaya merujuk pada kondisi di mana sebuah budaya tidak memiliki satu makna yang tetap dan tunggal, melainkan beragam makna yang lahir dari berbagai posisi subjek, konteks historis, dan relasi kekuasaan yang melingkupinya (Bhabha, 1994; Hall, 1997). Pluralitas ini bukan sekadar keragaman budaya antar kelompok, tetapi lebih mendalam lagi ini adalah keragaman dan kontestasi makna di dalam budaya itu sendiri.

Kajian ini bertujuan untuk: (1) menelaah landasan epistemologis pluralitas makna budaya dalam perspektif antropologi postmodernisme; (2) mengidentifikasi kontribusi teoretis para pemikir kunci dalam perdebatan ini; dan (3) menganalisis implikasi metodologis dan etis dari perspektif tersebut bagi praktik penelitian antropologi kontemporer. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih kaya dan reflektif tentang kompleksitas budaya manusia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka kritis (critical literature review) dengan paradigma kualitatif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bersifat teoritis dan konseptual, yakni menelaah bagaimana arus pemikiran postmodern merombak cara pandang terhadap kebudayaan sebagai sistem makna yang tidak tunggal, tidak stabil, dan selalu berada dalam proses negosiasi.

2. Sumber dan Bahan Kajian

Penelitian ini menggunakan empat kelompok sumber pustaka utama yang masing-masing mewakili tradisi pemikiran berbeda dalam antropologi postmodernisme:

a. Antropologi dan Krisis Representasi

Sumber utama pada kluster ini adalah Marcus dan Fischer (1986) dalam *Anthropology as Cultural Critique* serta Clifford dan Marcus (1986) dalam *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Karya-karya ini digunakan sebagai landasan untuk menelaah bagaimana asumsi-asumsi klasik tentang representasi budaya dipersoalkan, khususnya

menyangkut pertanyaan tentang siapa yang berhak berbicara tentang suatu budaya dan dengan cara apa.

b. Interpretivisme Budaya

Karya Clifford Geertz (1973), *The Interpretation of Cultures*, digunakan sebagai sumber untuk mengkaji fondasi pemahaman budaya sebagai sistem makna sebelum era postmodern formal. Karya ini menjadi titik tolak analisis karena Geertz menggeser focus antropologi dari pencarian hukum universal menuju pemahaman makna yang bersifat lokal, kontekstual, dan interpretatif melalui konsep thick description.

c. Postkolonialisme dan Identitas Hibrid

Sumber pada kluster ini mencakup karya Homi K. Bhabha (1994), *The Location of Culture*, serta karya Stuart Hall (1994, 1997) tentang representasi dan identitas kultural.

Karya-karya ini digunakan untuk menganalisis konsep hibriditas (hybridity), ruang ketiga (third space), dan sifat diskursif makna budaya sebagai efek dari praktik penandaan (signifying practices) yang terbuka dan kontingen.

d. Subaltern, Suara, dan Politik Representasi

Esai monumental Gayatri Chakravorty Spivak (1988), *Can the Subaltern Speak?*, digunakan sebagai sumber untuk mengkaji dimensi kekuasaan dalam representasi makna budaya, khususnya menyangkut kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari system wacana dominan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi mendalam terhadap karya-karya pustaka yang telah diidentifikasi di atas. Tahapan yang ditempuh meliputi:

- a. Identifikasi sumber:
Penelusuran karya-karya seminal dalam tradisi antropologi

postmodernisme, postkolonialisme, dan kajian budaya (cultural studies) yang relevan dengan tema pluralitas makna budaya.

- b. Seleksi sumber: Literatur dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevansi tematik

terhadap fokus kajian, signifikansi historis karya dalam perkembangan disiplin antropologi, serta kredibilitas akademik para pemikir yang dikaji.

c. Pembacaan kritis: Setiap sumber dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi argumen utama, konsep-konsep kunci, posisi epistemologis, dan implikasi metodologis yang ditawarkan oleh masing-masing pemikir.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan:

1. Analisis konseptual: Mengidentifikasi dan mengurai konsep-konsep kunci dari setiap tradisi pemikiran, seperti crisis of representation, partial truths, thick description, hybridity, third space, dan subaltern.
2. Analisis komparatif: Membandingkan dan mendialogkan posisi teoretis antar-pemikir—Geertz, Clifford, Marcus, Bhabha, Hall, dan Spivak—untuk menemukan titik-titik persamaan, perbedaan, ketegangan, maupun saling melengkapi dalam memahami pluralitas makna budaya.
3. Sintesis kritis: Mengintegrasikan temuan analisis ke dalam argumen yang koheren mengenai bagaimana antropologi postmodernisme membuka ruang epistemologis baru bagi pemahaman

identitas hibrid, subaltern, dan polifonik dalam realitas kultural kontemporer.

5. Validitas dan Kredibilitas Kajian

Mengikuti kriteria yang diajukan oleh Lincoln dan Guba (1985), kredibilitas kajian ini dijaga melalui:

- Triangulasi sumber: penggunaan karya dari pemikir yang beragam latar belakang, yakni antropologi (Geertz, Clifford, Marcus), kajian postkolonial (Bhabha, Spivak), dan kajian budaya (Hall), sehingga analisis tidak berpijak pada satu tradisi intelektual tunggal.
- Transparansi argumentasi: seluruh klaim analitis disertai rujukan eksplisit pada sumber primer yang dapat ditelusuri.
- Refleksivitas: sesuai dengan tuntutan epistemologis postmodern itu sendiri, kajian ini dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap posisi peneliti dalam proses produksi pengetahuan, bahwa tidak ada pembacaan yang sepenuhnya netral terhadap teks-teks yang dikaji.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Menggugat Objektivisme dalam Etnografi Klasik

Antropologi klasik, terutama dalam tradisi Malinowski dan Radcliffe-Brown, dibangun di atas cita-cita objektivisme ilmiah: peneliti yang baik adalah peneliti yang mampu menekan subjektivitasnya dan merekam budaya sebagaimana adanya. Namun, antropologi postmodern menunjukkan bahwa cita-cita ini tidak hanya tidak mungkin dicapai, tetapi juga problematik secara etis dan politis (Clifford, 1988; Marcus & Fischer, 1986).

Edward Said (1978), meskipun bukan seorang antropolog, memberikan kritik yang mengubah cara pandang banyak antropolog terhadap tradisi pengetahuan mereka sendiri. Dalam *Orientalism*, Said menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan Barat tentang "Timur" merupakan konstruksi wacana yang melayani kepentingan kolonial. Ini mendorong para antropolog untuk mempertanyakan: apakah etnografi-etnografi klasik tentang masyarakat non-Barat juga merupakan bentuk dominasi epistemik?

Jawaban yang muncul dari kalangan antropolog postmodern adalah ya—setidaknya sebagian. Tekstur kekuasaan yang tidak setara antara peneliti (umumnya dari Barat, berpendidikan tinggi) dan subjek penelitian (umumnya masyarakat non-Barat, sering dalam posisi subordinat) telah meresap ke dalam teks-teks etnografi itu sendiri. Budaya yang diteliti direpresentasikan sebagai objek yang dapat diketahui, sedangkan peneliti tetap berada dalam posisi subjek yang mengetahui—hierarki epistemik yang merefleksikan hierarki sosial yang lebih luas.

Etnografi Dialogis dan Polifoni

Sebagai respons terhadap masalah representasi, beberapa antropolog postmodern mengusulkan pendekatan etnografi yang lebih dialogis dan polifonik. Dennis Tedlock (1987) dan Dwight Conquergood (1985) mengembangkan model etnografi yang memposisikan penelitian sebagai percakapan antara peneliti dan narasumber, bukan sekadar observasi sepihak. Dalam model ini, makna budaya tidak dideklarasikan oleh peneliti, tetapi dinegosiasikan bersama dalam proses penelitian.

Polifoni istilah yang dipinjam dari teori sastra Mikhail Bakhtin merujuk pada kehadiran banyak suara yang tidak dapat direduksi menjadi satu narasi tunggal. Kevin Dwyer (1982) dalam *Moroccan Dialogues*, misalnya, menyajikan percakapan penelitiannya secara verbatim, memberikan ruang yang setara bagi suara narasumber untuk hadir dan bahkan mengkritisi sang peneliti. Eksperimen-eksperimen etnografis semacam ini merupakan upaya konkret untuk merespons tuntutan pluralitas makna budaya.

Namun, pendekatan dialogis ini juga menghadapi kritik internal. Apakah semata-mata memberikan lebih banyak ruang bagi suara narasumber sudah cukup untuk mengubah relasi kuasa yang struktural? Beberapa sarjana berargumen bahwa perubahan tekstual saja tidak memadai selama struktur institusional akademi dan penerbitan ilmiah masih didominasi oleh kepentingan tertentu (Lather, 1991; Fine, 1994).

Lokalitas, Globalisme, dan Reterritorialisasi Makna

Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, pertanyaan tentang pluralitas makna budaya menjadi

semakin kompleks. Arjun Appadurai (1996) dalam *Modernity at Large* memperkenalkan konsep "scapes" (ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, finanscapes, ideoscapes) untuk menggambarkan aliran-aliran budaya global yang menciptakan lanskap kultural yang cair, tidak terikat pada lokasi geografis tertentu, dan penuh dengan ketidakpastian.

Dalam perspektif Appadurai, globalisasi tidak menghasilkan homogenisasi budaya (sebagaimana dikhawatirkan dalam teori imperialisme budaya), melainkan menciptakan reteritorialisasi dan hibridisasi yang terus-menerus. Makna-makna budaya yang beredar secara global disesuaikan, diinterpretasikan ulang, dan dimaknai secara berbeda oleh komunitas-komunitas lokal yang berbeda pula. Ini adalah argument kuat untuk pluralitas makna budaya di era kontemporer.

Ulf Hannerz (1992) dalam *Cultural Complexity* mengembangkan konsep "creolization" untuk mendeskripsikan proses pencampuran dan pepaduan makna kultural dari berbagai sumber yang berbeda. Creolization bukanlah proses yang pasif atau deterministik;

ia adalah proses aktif di mana para aktor sosial bernegosiasi dengan makna-makna yang datang dari berbagai arah dan menciptakan sintesis-sintesis baru yang unik.

Implikasi bagi Metodologi Penelitian Antropologi

Pengakuan terhadap pluralitas makna budaya memiliki implikasi yang signifikan bagi metodologi penelitian antropologi. Pertama, penelitian tidak lagi dapat mengklaim objektivitas total; peneliti harus bersikap reflektif terhadap posisi, latar belakang, dan kepentingannya sendiri. Ini melahirkan apa yang dikenal sebagai "reflexive ethnography" atau etnografi reflektif (Ruby, 1982; Davies, 1999).

Kedua, validitas penelitian tidak lagi diukur semata-mata dari kesesuaiannya dengan standar ilmiah positivistik, tetapi juga dari kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab etisnya terhadap komunitas yang diteliti. Lincoln dan Guba (1985) mengajukan kriteria-kriteria alternatif seperti credibility (kredibilitas), transferability (transferabilitas), dependability (kebergantungan), dan confirmability (konfirmasiabilitas) sebagai pengganti kriteria validitas dan reliabilitas konvensional.

Ketiga, penelitian antropologi postmodern mendorong penggunaan metode-metode yang lebih beragam dan lebih sensitif terhadap suara-suara yang terpinggirkan: etnografi kolaboratif, penelitian tindakan partisipatif (participatory action research), autoetnografi, dan analisis wacana kritis, antara lain (Kemmis & McTaggart, 2005; Ellis & Bochner, 2000).

Kritik terhadap Relativisme Postmodern

Meskipun kontribusi antropologi postmodern sangat berharga, ia tidak terlepas dari kritik. Salah satu kritik paling serius adalah tuduhan relativisme yang berlebihan. Jika setiap makna budaya adalah valid dalam konteksnya sendiri, apakah ini berarti tidak ada standar etis yang dapat diterapkan secara lintas-budaya? Apakah praktik-praktik kultural yang merugikan (seperti kekerasan berbasis gender atau diskriminasi kasta) harus diterima atas nama relativisme kultural?

Para antropolog postmodern umumnya menolak relativisme absolut ini. Bhabha (1994), Hall (1997), dan Spivak (1988) semuanya mempertahankan komitmen terhadap kritik emansipatoris—yaitu keyakinan

bahwa masih ada standar-standar keadilan dan kesetaraan yang dapat diperjuangkan, meskipun standar-standar tersebut harus dirumuskan melalui dialog dan negosiasi lintas-budaya, bukan diimposisikan secara sepihak.

Kritik lain datang dari kalangan antropologi kritis yang berpendapat bahwa fokus postmodern pada teks, representasi, dan wacana terlalu mengabaikan kondisi material kehidupan manusia. Eric Wolf (1982) dan Sidney Mintz (1985) mengingatkan bahwa budaya tidak dapat dilepaskan dari ekonomi politik, sejarah kolonialisme, dan struktur-struktur ketimpangan yang nyata. Pluralitas makna bukan hanya soal permainan teks; ia berakar dalam perbedaan-perbedaan material yang konkret.

D. KESIMPULAN

Kajian ini telah menelusuri bagaimana antropologi postmodernisme telah mentransformasi pemahaman tentang makna budaya dari yang tunggal dan stabil menuju yang plural, kontingen, dan senantiasa dalam proses negosiasi. Melalui kontribusi teoretis dari Geertz, Clifford, Marcus, Bhabha,

Hall, Spivak, dan Appadurai, kita dapat melihat bahwa pluralitas makna budaya bukan sekadar klaim relativis, melainkan merupakan pengakuan terhadap kompleksitas ontologis kehidupan manusia.

Beberapa temuan utama dari kajian ini dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, krisis representasi dalam antropologi postmodern telah mempersoalkan klaim-klaim objektivitas dan universalitas dalam penulisan etnografi, mendorong kesadaran bahwa semua pengetahuan kultural bersifat parsial dan terkonstruksi. Kedua, konsep hibriditas, ruang ketiga, dan creolization menawarkan kerangka yang lebih dinamis untuk memahami bagaimana makna-makna budaya diproduksi, dinegosiasikan, dan ditransformasi dalam pertemuan antar-budaya dan dalam arus globalisasi.

Ketiga, perhatian terhadap suara-suara subaltern dan relasi kekuasaan yang asimetris mengingatkan bahwa pluralitas makna tidak terjadi dalam ruang hampa kuasa; ada hierarki-hierarki yang menentukan suara mana yang dapat terdengar dan suara mana yang dibungkam. Keempat, implikasi

metodologis dari perspektif ini menuntut pendekatan penelitian yang lebih refleksif, dialogis, dan bertanggung jawab secara etis terhadap komunitas yang diteliti.

Pada akhirnya, pengakuan terhadap pluralitas makna budaya bukan berarti menyerah pada relativisme atau nihilisme intelektual. Justru sebaliknya, ia merupakan prasyarat bagi sebuah ilmu pengetahuan yang jujur dan ilmu pengetahuan yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan dalam segala keragamannya. Tugas antropologi ke depan adalah terus mengembangkan kerangka analitis dan metodologis yang mampu menghormati pluralitas tersebut sembari tetap mempertahankan komitmen terhadap keadilan dan emansipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
- Clifford, J. (1988). *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*. Harvard University Press.

- Clifford, J., & Marcus, G. E. (Eds.). (1986). *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. University of California Press.
- Conquergood, D. (1985). Performing as a Moral Act: Ethical Dimensions of the Ethnography of Performance. *Literature in Performance*, 5(2), 1–13.
- Davies, C. A. (1999). *Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others*. Routledge.
- Derrida, J. (1976). *Of Grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press.
- Dwyer, K. (1982). *Moroccan Dialogues: Anthropology in Question*. Waveland Press.
- Ellis, C., & Bochner, A. P. (2000). Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (2nd ed., pp. 733–768). Sage.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Pantheon Books.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Hall, S. (1994). Cultural Identity and Diaspora. In P. Williams & L. Chrisman (Eds.), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader* (pp. 392–403). Columbia University Press.
- Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage / Open University Press.
- Hannerz, U. (1992). *Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning*. Columbia University Press.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., pp. 559–603). Sage.
- Lather, P. (1991). *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/in the Postmodern*. Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage.
- Lyotard, J.-F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (G. Bennington & B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press.
- Malinowski, B. (1922). *Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*. Routledge.
- Marcus, G. E., & Fischer, M. M. J. (1986). *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*. University of Chicago Press.
- Mintz, S. W. (1985). *Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History*. Viking.
- Ruby, J. (1982). *A Crack in the Mirror: Reflexive Perspectives in Anthropology*. University of Pennsylvania Press.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the*

- Interpretation of Culture (pp. 271–313). University of Illinois Press.
- Tedlock, D. (1987). Questions Concerning Dialogical Anthropology. *Journal of Anthropological Research*, 43(4), 325–344.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*. John Murray.
- Wolf, E. R. (1982). *Europe and the People without History*. University of California Press.
- **Artikel Jurnal** —
- Ahearn, L. M. (2001). Language and Agency. *Annual Review of Anthropology*, 30, 109–137. <https://doi.org/10.1146/annurev.ant.hro.30.1.109>
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Fine, M. (1994). Working the Hyphens: Reinventing Self and Other in Qualitative Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 70–82). Sage.
- Fischer, M. M. J. (1986). Ethnicity and the Post-Modern Arts of Memory. In J. Clifford & G. E. Marcus (Eds.), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography* (pp. 194–233). University of California Press.
- Gupta, A., & Ferguson, J. (1992). Beyond Culture: Space, Identity, and the Politics of Difference. *Cultural Anthropology*, 7(1), 6–23. <https://doi.org/10.1525/can.1992.7.1.02a00020>
- Haraway, D. (1988). *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective*. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599. <https://doi.org/10.2307/3178066>
- Hastrup, K. (1992). Writing Ethnography: State of the Art. In J. Okely & H. Callaway (Eds.), *Anthropology and Autobiography* (pp. 116–133). Routledge.
- Ortner, S. B. (1984). Theory in Anthropology since the Sixties. *Comparative Studies in Society and History*, 26(1), 126–166.
- Rosaldo, R. (1989). *Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis*. Beacon Press.
- Strathern, M. (1987). Out of Context: The Persuasive Fictions of Anthropology. *Current Anthropology*, 28(3), 251–281.